

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Selatan

Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Andoolo merupakan ibu kota kabupaten ini. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kendari yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Kabupaten Konawe Selatan terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, membujur dari utara ke selatan antara 3,58° dan 4,31° Lintang Selatan dan membujur dari barat ke timur antara 121°58' dan 123°16 BT. Batas-batas wilayah kabupaten ini adalah sebagai berikut::

1. kabupaten konawe dan kota kendari disebelah utara
2. laut banda dan laut Maluku di sebelah timur
3. kabupaten muna dan kabupaten bombana di sebelah selatan
4. kabupaten kolaka di sebelah barat.

Dengan luas 451.421 hektar, wilayah Kabupaten Konawe Selatan mencakup 11,83% dari luas daratan Sulawesi Tenggara. Luas wilayah perairan adalah 9.268 kilometer persegi. Terdiri dari 25 kecamatan, 15 kelurahan, dan 336 desa, Kabupaten Konawe Selatan memiliki luas wilayah 5.779,47 km dan jumlah penduduk 306.783 jiwa.

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian Dinas Kelautan Dan Perikanan kabupaten konawe selatan

Berlokasi di Kompleks Kantor Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo No. 1, Andoolo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah. Dinas ini mengawasi, mengelola, dan mempromosikan industri perikanan di Kabupaten Konawe Selatan. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam industri perikanan, ada beberapa elemen penting yang menjadi fokus perhatian, antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan efektif- termasuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap-dicapai dengan memastikan keberlanjutan dan keragaman ekosistem, sehingga memungkinkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
2. meningkatkan kualitas produk yang terkait dengan perikanan:

Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk perikanan dengan menggunakan praktik dan teknologi terbaik dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan merupakan hal yang sangat penting bagi Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

3. pengawasan dan pembinaan perikanan:

Kami memantau industri gua sesuai dengan peraturan dan kebijakan perikanan yang ada untuk membantu menghindari pelanggaran. Kami juga

menyediakan sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam program pembinaan dan pengembangan sektor perikanan.

4. kerja sama dan kemitraan :

Untuk meningkatkan industri perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan mendorong kerja sama di antara banyak lembaga lokal, regional, dan dunia untuk berbagi keahlian dan sumber daya..

Anggota staf yang kompeten dan profesional membantu Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi ini memastikan pengelolaan dan koordinasi perikanan di Kabupaten Konawe Selatan berjalan efektif dan terkoordinasi..

Bertempat di Kantor Cabang BNI Syariah Kendari pada Kamis, 26 November 2021, BNI Syariah memberikan pembiayaan KUR Syariah kepada mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pada kesempatan ini, BNI Syariah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Perjanjian tersebut terkait dengan penyebaran mitra binaan dengan menggunakan dana KUR Syariah.

Hadir dalam acara ini Syamsul, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; Jon Sujani Pasaribu, Pemimpin Divisi Bisnis Mikro BNI Syariah; Ali Muafa, Pemimpin BNI Syariah Wilayah Timur; Anang Hery Anshory, Deputy Pemimpin BNI Syariah Wilayah Timur; dan Dedy Sukmana, Pemimpin BNI Syariah Kantor Cabang Kendari. Tahap pertama

dalam pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Jon Sujani Pasaribu, Pemimpin Divisi Bisnis Mikro BNI Syariah, adalah dengan adanya pembiayaan KUR Syariah yang diberikan kepada mitra binaan DKP Konawe Selatan.

Oleh karena itu, Jon Sujani Pasaribu mengatakan bahwa dengan bekerja sama meningkatkan pertumbuhan mitra binaan melalui pembiayaan KUR Syariah, BNI Syariah telah menciptakan sejarah. Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah berkomitmen terhadap pengembangan ekosistem halal-yang di dalamnya termasuk pemberdayaan UMKM-secara menyeluruh. "Suatu kebanggaan dapat bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Konawe Selatan untuk mengembangkan mitra binaan," ujar juru bicara tersebut.

Keberhasilan kerja sama ini ke depannya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf ekonomi mereka. Selain itu, BNI Syariah ingin terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengembangkan mitra binaan. Syamsul, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengatakan kerja sama ini sejalan dengan arahan Kementerian Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daya Saing yang menetapkan Konawe Selatan sebagai kawasan klaster daya saing untuk pertumbuhan masyarakat nelayan. Syamsul mengatakan bahwa dengan meningkatkan pendapatan nelayan, kerja sama ini menandai dimulainya pembangunan ekonomi masyarakat Konawe Selatan.

“Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Konawe Selatan mengucapkan terima kasih kepada BNI Syariah Kantor Cabang Kendari yang telah menunjuk kami sebagai mitra kerja” ujar Syamsul. Dalam kerja sama dengan BNI Syariah ini, pembiayaan mikro senilai Rp1,5 miliar diberikan kepada

lima puluh orang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Sebagian besar anggota mitra binaan ini adalah pedagang, pemasar, dan pembudidaya ikan air tawar. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu opsi pembiayaan KUR Syariah bagi pelaku usaha UMKM sektor kelautan dan perikanan semakin meluas, sehingga dapat memperluas akses bagi para pelaku UMKM. Dalam hal ini, BNI Syariah akan membantu mitra binaan untuk meningkatkan produksi, kualitas, kontinuitas, dan daya saing. Selain itu, BNI Syariah akan membantu mempercepat pemanfaatan pembiayaan perbankan.

Hingga triwulan III tahun 2022, BNI Syariah mencatatkan realisasi pembiayaan mikro sebesar Rp1,62 triliun dengan jumlah nasabah sebanyak 12.233 orang. Resmi ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui produk BNI KUR iB Hasanah pada tahun ini dengan margin efektif 6% per tahun, BNI Syariah telah ditunjuk oleh pemerintah melalui akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, BNI Syariah berupaya meningkatkan daya saing UMKM dan penyerapan tenaga kerja, mendongkrak daya saing, serta memaksimalkan bisnis pembiayaan mikro dengan cara menghidupkan usaha-usaha produktif melalui produk BNI KUR iB Hasanah. BNI Syariah meluncurkan kampanye Awal Kebaikan KUR (AKUR Hasanah) untuk membantu memasarkan produk BNI KUR iB Hasanah. Berlangsung mulai 1 September hingga 1 Desember 2021, program AKUR Hasanah ini Bagi pelaku usaha berprestasi yang mengikuti program AKUR, BNI Syariah menyediakan beragam hadiah. Diantaranya adalah 25 sepeda lipat, 10 diskon haji secara keseluruhan, dan 100 potongan harga.

4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

Visi :

“Terwujudnya Konawe Selatan sebagai Kabupaten Maritim dan Perikanan yang Berdaya Saing, Mandiri dan Berkelanjutan”

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil kelautan dan perikanan.
4. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan

Berikut adalah penjelasan atau untuk menggapai hasil dari pada visi misi dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan.

a. Tugas dan Fungsi

Peran utama Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan adalah menangani urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan. DKP Konawe Selatan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan utamanya:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

3. Bantuan teknis dan saran kelautan dan perikanan berbasis lapangan.
4. Penyelesaian tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menjalankan berbagai inisiatif dan kegiatan untuk membantu memenuhi visi dan tujuannya. Di antara inisiatif dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 2. Program yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk kelautan dan perikanan
 3. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan
 4. Program Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- a. Keberhasilan

Produktivitas dan hasil produksi kelautan dan perikanan telah ditingkatkan secara efektif oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Ikan yang diproduksi di Kabupaten Konawe Selatan meningkat dari 27.775 ton pada tahun 2021 menjadi 29.988 ton pada tahun 2022. Selanjutnya yang meningkat dari 4.480 ton pada tahun 2021 menjadi 5.580 ton pada tahun 2022 adalah produksi udang.

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan juga berhasil meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Dari Rp 1,1 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 1,2 triliun pada tahun 2022 nilai ekspor barang kelautan dan perikanan dari Kabupaten Konawe Selatan naik.

b. Tantangan

Tantangan utama Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di kota-kota perikanan. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan memiliki tantangan dalam perlindungan sumber daya perikanan.

c. Upaya Penanganan

Melalui berbagai inisiatif dan kegiatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan berdedikasi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Diantaranya adalah:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
2. Program Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan telah menunjukkan kinerja yang luar biasa untuk memenuhi tujuan dan sasarannya. Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan berdedikasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Melengkapi sistem pemberdayaan dan efektivitas dalam permodalan lembaga keuangan mikro syariah berbasis kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan dalam perspektif masalah mursalah melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terungkap data hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah khusus, temuan penelitian dibagi menjadi dua sub pokok bahasan yaitu efektivitas pemberdayaan pada lembaga keuangan mikro syariah dalam perspektif masalah mursalah dan sistem

pemberdayaan dalam permodalan lembaga keuangan mikro syariah berbasis kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan

4.2.1 Sistem Pemberdayaan Modal Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Kabupaten Konawe Selatan

4.2.1.1 kerjasama dan kemitraan

Berdasarkan data wawancara di lapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan mendorong kerja sama dengan berbagai pihak baik lokal, regional, maupun dunia untuk saling berbagi informasi dan sumber daya sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan UMKM.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pak Imam Munawar selaku sekretaris dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan yang dimana bapak.... Menjelaskan Pada tanggal 26 november 2021 BNI Syariah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah kepada mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, Kamis (26/11). Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BNI Syariah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan tentang peningkatan pengembangan mitra binaan melalui penyaluran pembiayaan KUR Syariah.” (wawancara pada tanggal 18 oktober 2023)

Bekerja sama dengan organisasi keuangan mikro syariah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan membantu meningkatkan pertumbuhan komersial kelompok mitra binaan. Temuan lapangan yang diberikan membantu membenarkan kesimpulan ini..

Pelaksana inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Konawe Selatan. Dengan fokus pada masyarakat kecil dan menengah, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Dalam

program ini, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembiayaan LKMS untuk masyarakat kelautan dan perikanan.

“Hasil wawancara dengan ibu zamsinar selaku mitra binaan yang dimana ibu menuturkan kata yang dimana Menurut saya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya masyarakat kecil dan menengah. Program ini telah membantu kami untuk meningkatkan usaha kami, program ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh LKMS adalah pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli.” (wawancara pada tanggal 19 oktober 2023)

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembentukan program pemberdayaan modal di lembaga keuangan mikro syariah sangat bermanfaat bagi mitra binaan. Program ini sesuai dengan aturan syariah dan membantu anggota mitra binaan untuk meningkatkan perusahaan mereka.

4.2.1.2 Tahapan Pemberdayaan

Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

1. Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok menandai langkah pertama dari inisiatif ini. Untuk membangun organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan akan mengindoktrinasi dan mendampingi para pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat nelayan. Kelompok yang dibentuk harus memenuhi persyaratan tertentu termasuk minimal 10 anggota, ide bisnis yang jelas, dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan.

2. Kegiatan Pembinaan

Setelah terbentuk, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan akan melibatkan kelompok dalam kegiatan pembelajaran. Program pendampingan ini mencakup pengembangan keterampilan, dukungan perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Pelatihan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas operasional anggota kelompok dalam menjalankan perusahaan mereka. Dukungan usaha bertujuan untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada anggota kelompok agar mereka dapat menjalankan perusahaan mereka. Pengembangan bisnis bertujuan untuk membantu anggota kelompok dalam pertumbuhan perusahaan mereka.

1. Pemberian Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro syariah akan mendanai perusahaan yang memenuhi persyaratan setelah melakukan kegiatan pembinaan. Anggota kelompok memiliki modal perusahaan berkat pendanaan ini. LKMS akan menawarkan pendanaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

“Hasil wawancara dengan bapak Imam Munawar yang dimana bapak mengungkapkan Secara umum, saya menilai sistem pemberdayaan modal LKMS berbasis kelompok mitra binaan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Konawe Selatan ini sudah berjalan dengan baik. Program ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan, dan Saya berharap sistem pemberdayaan modal LKMS berbasis kelompok mitra binaan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Konawe Selatan ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan.” (wawancara pada tanggal 18 oktober 2023)

4.2.1.3 Sistem Pemberdayaan

Melalui pemberdayaan modal dari LKMS, berdasarkan Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Sistem Pemberdayaan Modal Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Selatan melalui pemberdayaan modal yang ditetapkan melalui penelitian lapangan. Bekerja sama dengan LKMS, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan menjalankan proyek ini..

“Sistem pemberdayaan modal tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu, pertama, Kelompok mitra binaan yaitu kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang memiliki usaha ada yang dibidang petani ikan air tawar pemasar dan lain-lain. Kedua, LKMS yaitu lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan, simpanan, dan jasa keuangan lainnya. Ketiga, LKMS yang terlibat dalam pemberdayaan modal berbasis kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Konawe Selatan adalah LKMS-LKMS yang telah bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Ke empat, Pemerintah daerah yaitu memberikan dukungan kepada program pemberdayaan modal berbasis kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut dapat berupa dana hibah, pelatihan, dan pendampingan.” (Hasil wawancara dengan bapak Imam Munawar, pada tanggal 18 oktober 2023)).

Seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Imam Munawar, sistem pemberdayaan modal di Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari tiga elemen utama berdasarkan kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya ikan air tawar, pemasar, dan

pengolah hasil laut merupakan bagian dari kelompok ini, yang bergerak di bidang industri kelautan dan perikanan

4.2.1.4 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga keuangan adalah badan usaha di bidang keuangan yang bertugas menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat luas. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, baik konvensional maupun syariah, yang mendefinisikan Lembaga Keuangan sebagai "semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali uang tersebut ke masyarakat" mewujudkan gagasan yang sama. Membentuk kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, LKMS merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pemberdayaan permodalan berbasis kelompok mitra binaan. Selain itu, pemerintah daerah membantu inisiatif pemberdayaan modal dengan mendukung organisasi mitra Dinas Kelautan dan Perikanan. Bantuan ini dapat berupa hibah, pendampingan, dan pelatihan (Jenita, 2017).

Berdasarkan organisasi mitra yang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sistem pemberdayaan modal yang lengkap di Kabupaten Konawe Selatan menggabungkan banyak pemangku kepentingan. Elemen-elemen ini mendefinisikan sistem ini.

Bapak "ihlas" menjelaskan, sebagai anggota mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan, proses pemberdayaan modal dilakukan melalui berbagai tahapan, yang terdiri dari:

“Pemilihan kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan seleksi untuk memilih kelompok mitra binaan yang akan menerima pembiayaan dari LKMS. Seleksi dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti jenis usaha, kondisi keuangan, dan potensi pengembangan usaha. Kemudian dilakukan pendampingan kepada kelompok mitra binaan dalam mengelola usaha mereka. Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan ataupun pedagang. Selanjutnya memberikan pembiayaan kepada kelompok mitra binaan untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan diberikan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan terakhir dilakukan Pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan oleh kelompok mitra binaan”. (Hasil Wawancara dengan pak ikhlas selaku mitra binaan pada tanggal 18 oktober 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat proses pemberdayaan modal di Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh organisasi mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Prosedurnya terdiri dari lima tahap:

1. melalui prosedur seleksi, organisasi mitra binaan dipilih untuk memastikan organisasi mana yang akan didanai oleh LKMS. Prosedur pemilihan didasarkan pada banyak aspek, termasuk jenis perusahaan, situasi keuangan, dan kemungkinan pertumbuhan bisnis.
2. Para profesional di industri kelautan dan perikanan memberikan bimbingan manajemen bisnis kepada kelompok mitra binaan.

3. Dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, pembiayaan diberikan kepada mitra binaan untuk membantu pertumbuhan usaha mereka.
4. Penggunaan pembiayaan oleh perusahaan mitra binaan diawasi secara terus menerus untuk menjamin penggunaan yang efisien dan efektif.
5. Evaluasi terhadap efisiensi program penguatan modal dalam menggunakan dana yang diberikan oleh perusahaan mitra binaan.

“Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan dilapangan dengan mitra binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan modal yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro syariah sebesar 1,5 miliar kepada 50 anggota mitra binaan dinas kelautan dan perikanan konawe selatan yang dimana anggota mitra binaan tersebut mayoritas adalah pedagang, pemasar, dan petani ikan air tawar. yang dimana dalam setiap kelompok bervariasi modal yang diberikan, tergantung dari segi apa usahanya. Dan sistem pengembalianya dengan akad murabahah, mitra binaan membayar secara angsuran dengan margin 6% per tahun.”

4.2.1.5 Konsep Pemberdayaan

Sumaryadi (2005:11) juga mendefinisikan pemberdayaan permodalan lembaga keuangan mikro syariah kepada mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan pada intinya adalah sebagai berikut: “upaya mempersiapkan masyarakat disertai langkah-langkah penguatan kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”:

- (1). Mendorong pembangunan manusia secara nyata dan menyeluruh bagi kelompok-kelompok yang terisih atau terdiskriminasi - penyandang disabilitas, kaum muda yang sedang mencari pekerjaan, masyarakat

adat yang belum berkembang, kaum miskin kantoran, organisasi perempuan - termasuk penyandang cacat.

- (2). Sementara secara bersamaan berpartisipasi dalam pertumbuhan komersial, memberikan pemberdayaan sosial-ekonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat ini akan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, menjadi lebih mandiri, dan maju dalam pembangunan mereka.

“Hasil wawancara dengan bapak Imam Munawar selaku sekretaris dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan yang dimana bapak menuturkan kata bahwa Konsep pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah dinas kelautan dan perikanan konawe selatan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, agar mereka dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kelembagaan masyarakat, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya mereka dengan lebih baik dan efektif.” (wawancara pada tanggal 18 oktober 2023)

Hasil wawancara tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa salah satu strategi atau pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang lebih maju dan unggul adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga memfasilitasi pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari melalui konsep pemberdayaan.

4.2.1.6 Teori Sistem

Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang dihubungkan untuk memungkinkan aliran data, materi, atau energi untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Frasa ini sering

digunakan untuk mendefinisikan sekelompok objek yang saling berinteraksi yang biasanya dapat dibuat model matematisnya.

Umumnya , sistem dapat dikarakterisasikan sebagai berikut:

1. kumpulan bagian atau komponen yang saling berinteraksi dan terhubung.
2. memiliki tujuan di dalam konteks yang ditentukan.
3. memiliki batasan atau pedoman tertentu.

Berdasarkan kumpulan data yang diberikan, pada dasarnya dapat dicirikan bahwa sistem pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah adalah sebagai berikut: berbasis pada kelompok mitra binaan dinas kelautan dan perikanan Konawe Selatan:

Dalam hal ini, sebuah inisiatif nasional yang diawali dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian diikuti dengan keterlibatan perbankan sebagai lembaga penyalur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan sebagai fasilitator. Sistem pemberdayaan modal dari lembaga keuangan mikro syariah kemudian digunakan kepada mitra binaan dinas kelautan dan perikanan. Setelah kebutuhan terpenuhi, dilakukan pengembangan mitra binaan, tahap pengajuan, pendataan, dan seleksi. Pelatihan dan bimbingan diberikan; kemudian, pendanaan diberikan.

4.2.1.7 Pemantauan Dan Evaluasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan memantau dan menilai pertumbuhan komersial perusahaan mitra binaan yang

mendapatkan pendanaan LKMS. Pemantauan dan penilaian ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang diberikan LKMS digunakan secara bijaksana dan berhasil.

Didirikan pada kelompok mitra binaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Konawe Selatan, metode pemberdayaan modal telah menghasilkan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan pendanaan lembaga keuangan mikro (LKM) bagi pelaku usaha industri kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sehingga mereka dapat melakukan kegiatannya dengan lebih efisien
3. Meningkatkan output dan keuntungan pelaku usaha
4. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan keluarganya

Temuan penilaian menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan modal - berdasarkan kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Konawe Selatan - telah meningkatkan perkembangan komersial masing-masing kelompok mitra. Setelah pendanaan LKM, produktivitas usaha rata-rata kelompok mitra meningkat sebesar 15%; pendapatan rata-rata para pelaku usaha di kelompok mitra binaan juga meningkat sebesar 20%.

4.2.3 Efektivitas Pemberdayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dinas Kelautan Dan Perikanan Perspektif Masalah Mursalah

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, menurut Soerjono Soekanto (1986:25), kata "efektivitas" berasal dari kata "efektifitas" yang menggambarkan derajat keberhasilan kolektif dalam mencapai tujuan. Emerson Handayani (1985:38) juga mengemukakan bahwa "efektivitas" adalah suatu ukuran tercapainya target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah sponsor yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan:

4.2.3.1 Peningkatan Pendapatan

Produksi pendapatan dalam kerangka lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat diukur dari peningkatan omset perusahaan atau pendapatan dari usaha lain yang menguntungkan. Tolok ukur yang paling sering digunakan untuk menilai efektivitas pemberdayaan adalah peningkatan pendapatan

Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, menurut Bapak Putra, salah satu anggota mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, hal tersebut:

“Menurut hasil wawancara dengan bapak putra selaku anggota mitra binaan (pada tanggal 18 oktober 2023) yang dimana bapak “Putra” mengatakan Saya menilai bahwa efektivitas pemberdayaan pada LKMS kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu peningkatan kesejahteraan mitra binaan, yang dimana dulunya saya punya kolam ikan ini saya pakai terpal, namun sekarang saya sudah bisa bikin kolam dengan beton. Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMS telah berhasil meningkatkan

kesejahteraan kelompok kami. dilihat dari peningkatan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup. program pinjaman modal usaha telah membantu kelompok mitra binaan untuk mengembangkan usahanya. Dengan pinjaman modal usaha, kelompok mitra binaan dapat membeli peralatan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Hal ini telah meningkatkan pendapatan usaha kelompok mitra binaan.”

Peningkatan kesejahteraan mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan mengindikasikan bahwa peneliti dapat menyimpulkan pemberdayaan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah kepada anggota mitra binaan cukup berhasil. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup yang lebih baik menunjukkan efektivitas inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMS dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok mitra binaan.

4.2.3.2 Peningkatan Kesejahteraan

Karena mencakup peningkatan kualitas hidup secara umum, termasuk tingkat pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal, peningkatan kesejahteraan merupakan indikasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan pendapatan yang lebih tinggi.

“berdasarkan hasil wawancara dengan bapak arif selaku anggota mitra binaan yang dimana dia mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan kami sebagai hasil dari pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah sangat meningkat hal hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup anggota mitra binaan dinas kelautan dan perikanan secara keseluruhan” (wawancara pada tanggal 17 oktober 2023)

Berdasarkan kualitas hidup dan pendidikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan di Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Konawe Selatan cukup berhasil. Hasil wawancara di atas mendukung hal ini

4.2.3.3 Efektivitas Pemberdayaan

Temuan wawancara lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang menjadi mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kerangka masalah mursalah dapat dilihat dari berbagai indikator:

1. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan kelompok mitra yang dibina. Pemberdayaan jelas berhasil karena meningkatkan kesejahteraan kelompok mitra binaan di semua bidang termasuk spiritual, sosial, dan keuangan. Dengan memberikan pinjaman modal usaha, pengembangan keterampilan, dan dukungan bisnis, lembaga keuangan mikro (LKM) dapat membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok mitra binaan.
2. Meningkatnya kemampuan kelompok mitra binaan juga menunjukkan keberhasilan pemberdayaan. Melalui pelatihan manajemen keuangan, kewirausahaan, dan pemasaran, LKM membantu kelompok mitra binaan menjadi lebih berday
3. Meningkatnya keterlibatan kelompok mitra binaan. Partisipasi yang lebih tinggi dari kelompok mitra binaan dalam kegiatan politik, sosial, dan ekonomi juga menunjukkan efektivitas pemberdayaan. Melalui inisiatif pemberdayaan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, LKM dapat membantu meningkatkan partisipasi organisasi mitra binaan..

“Hasil wawancara dengan Mudassir selaku anggota mitra binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan (pada tanggal 18 oktober 2023) yang dimana bapak menjelaskan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan pada LKMS kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten konawe selatan ada beberapa masukan yang pertama Perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap program-program pemberdayaan yang dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program-program pemberdayaan dan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara LKMS, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan membantu untuk memastikan bahwa program-program pemberdayaan berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep pemberdayaan. Masyarakat perlu memahami bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kapasitas, dan partisipasi masyarakat.”

Hasil wawancara dan analisis mendukung keberhasilan pemberdayaan yang cukup baik di LKMS kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Peningkatan pendapatan, kepemilikan aset, dan kualitas hidup yang lebih baik, semuanya menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan yang dijalankan oleh LKM telah membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok mitra. Inisiatif pemberdayaan yang dilakukan oleh LKM juga telah meningkatkan kapasitas kelompok mitra binaan, hal ini terlihat dari perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kelompok mitra binaan dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, keterlibatan kelompok mitra binaan juga semakin meningkat

Program pemberdayaan LKM juga telah berhasil meningkatkan keterlibatan kelompok mitra binaan dalam kegiatan politik, sosial dan keuangan. Meningkatnya kesejahteraan, kemampuan, dan keterlibatan kelompok mitra binaan secara umum menunjukkan bahwa inisiatif

pemberdayaan yang dilakukan LKM telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

4.2.4.1 Perspektif Masalah Mursalah

Al-Maslahah Al-mursalah terdiri dari dua istilah masalahah dan mursalah. Maslahat, berasal dari kata Arab "mashlahah" dengan bentuk jamaknya, "maslahih," yang secara etimologis berarti "manfaat," "kebaikan," "faedah," "guna," atau "kegunaan," yang telah diindonesiakan. Masalahah adalah bentuk mashdar dari "fi'il shalaha," dan merupakan kebalikan dari kata "mafsadat," yang berarti "kerusakan," "kehancuran."

Al-maslahah Al-mursalah kadang-kadang dikenal sebagai maslahat mutlak (umum). Al-Maslahah adalah manfaat yang dinilai baik oleh akal, sejalan dengan tujuan-tujuan syara" menurut istilah ulama ushul, namun tidak ada aturan syara" yang mempertimbangkannya atau melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari sebuah hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yang terdiri dari menarik suatu manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan masalah manusia. Kemaslahatan ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan lingkungannya, tidak terbatas pada elemen atau penghuninya

Maslahah Mursalah juga harus sesuai dengan tujuan hukum Islam. Masalahah Mursalah pada dasarnya adalah menarik manfaat untuk membantu seseorang terhindar dari bencana.

Maslahah Mursalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Jumhur Ulama memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

1. kemaslahatan tersebut haruslah "masalah yang haqiqi", yang bukan merupakan kemaslahatan yang menyimpang dari dugaan. Ide dasarnya adalah bahwa hukum harus diikuti dengan tujuan untuk mengurangi kerusakan.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, namun tidak dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah ketika ada kekhususan dalam penerapan hukum tentang kemaslahatan tersebut.
3. Tidak ada pertentangan antara kemaslahatan tersebut dengan nash yang ada dalam sumber utama, Al-Quran dan Hadits (Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, 2008)

Ketika Masalah Mursalah memenuhi kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka ia dapat digunakan sebagai dasar hukum dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Mengingat kualitas dan pentingnya manfaatnya, Masalah Mursalah dapat digabungkan dengan pemberdayaan permodalan lembaga keuangan mikro syariah melalui pengembangan kelompok mitra di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Hukum Islam secara alamiah mengekspresikan gagasan tentang kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Masalah mursalah dapat dilihat dalam kerangka pemberdayaan modal lembaga keuangan mikro syariah sebagai tujuan bersama atau kesejahteraan yang dapat dicapai melalui pendanaannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ١٨٥

Terjemahan:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah 2:185).

Sejalan dengan tujuan penggunaan masalah mursalah, yaitu untuk mempromosikan kemudahan dan menghindari masalah, ayat ini termasuk prinsip utama yang tertanam dalam agama Islam secara keseluruhan: "untuk mempermudah dan tidak mempersulit."

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 berikut ini: yang menjadi dasar legalitas masalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Karakter dasar rahmat benar-benar merupakan keuntungan bagi umat manusia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Ayat selanjutnya dari Surat An-Nahl, nomor 90, mengatakan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, Kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Menurut hadits yang disampaikan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Janganlah kamu memudharatkan (diri sendiri) dan jangan pula memudharatkan (orang lain)”

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Artinya:

“Berlaku tidaknya hukum tergantung dari ada atau tidaknya illat (sebab) (Al-Ghazali, 1971), diberlakukannya hukum itu berlaku bersama illat (sebab) nya.”

Dari sudut pandang masalah mursalah, seseorang dapat menilai efektivitas pemberdayaan dengan menggunakan berbagai kriteria termasuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemberdayaan yang efektif harus membantu masyarakat untuk tumbuh dalam kesejahteraan. Peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup dapat menjadi tolok ukur untuk mengukur hal ini.

2. Meningkatkan produktivitas usaha

Selain itu, penggunaan pemberdayaan yang baik dapat membantu meningkatkan hasil dari perusahaan lokal. Pertumbuhan perusahaan yang mereka awasi membantu seseorang untuk mengukur hal ini.

3. Meningkatkan kemandirian masyarakat

Pemberdayaan yang baik dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menjalankan bisnis mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri dapat membantu mengukur hal ini

Perspektif masalah mursalah dapat dimasukkan ke dalam pemberdayaan permodalan lembaga keuangan mikro syariah melalui kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan kualitas dan relevansi manfaatnya. Hasil penelitian lapangan membantu mendefinisikan perspektif ini. karena gagasan dalam hukum Islam sendiri berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum. Dari berbagai sudut pandang, kita bisa melihat efektivitas pemberdayaan di LKM Dinas Kelautan dan Perikanan:

1. Aspek kemaslahatan. Manfaat langsung dan tidak langsung dari pemberdayaan telah dirasakan oleh masyarakat. Melalui inisiatif pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, LKM dapat membantu memperkuat masyarakat
2. Aspek keadilan. Pemberdayaan harus dilakukan secara adil tanpa adanya prasangka yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) membantu mewujudkan keadilan pemberdayaan dengan menjamin kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Menelaah sejauh mana inisiatif pemberdayaan

ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kapasitas, dan partisipasi kelompok mitra binaan, seperti yang ditunjukkan oleh indikator dan elemen-elemen ini, membantu seseorang untuk menilai efektivitas pemberdayaan di LKM Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, proyek-proyek pemberdayaan ini harus didasarkan pada nilai-nilai masalah mursalah, yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan manfaat. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al Qur'an:.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ١٨٥

Terjemahan:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. Al-Baqarah 2:185).

"Mempermudah dan tidak mempersulit" adalah ide utama yang ditemukan dalam ayat ini yang termasuk dalam agama Islam secara keseluruhan: hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan masalah mursalah, yaitu untuk menjamin kemudahan dan menghindari masalah.

“berdasarkan hasil wawancara dengan bapak “Arif”, selaku mitra binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan (pada tanggal 17 oktober 2023), pemberdayaan pada LKMS tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mitra binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten konawe selatan. hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, pendapatan rata-rata anggota LKMS kelompok mitra binaan Dinas Kelautan dan Perikanan meningkat sekitar 20% setelah mengikuti program pemberdayaan., kualitas hidup, dan penerapan praktik-praktik pengolahan ikan air tawar yang berkelanjutan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Arif, Ketua Kelompok Mitra Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan, menunjukkan bahwa pemberdayaan LKM

sangat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan, kualitas hidup, dan penggunaan metode budidaya dan perdagangan ikan yang ramah lingkungan

